

## ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

<sup>1</sup>Mashudi Karyadinata, <sup>2</sup>Sri Maulidiah

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

<sup>2</sup>Corresponding Author: sri.ip@soc.uir.ac.id

### ABSTRACT

This research is based on conditions in which there are still many deficiencies in the management process, there are still many assets of the Meranti Islands Regency Education and Culture Office that have not been properly recorded and recorded, so that the true value of assets is difficult to know and the whereabouts of these assets are difficult to trace. Apart from that, the information regarding the reporting of assets at the agency is not accurate. As for the purpose of the research is to find out whether the management of regional assets at the agency has been running well in accordance with the applicable regulations and what obstacles are faced in the implementation of regional asset management at the Department of Education and Culture of the Meranti Islands Regency. In this study, the authors used the theoretical concepts put forward by George R. Terry, planning, organizing, actuating and controlling. The form or method used in this research is qualitative. While the data collection technique is done through observation, interview and documentation methods. The results of this study indicate that the regional asset management at the Meranti Islands District Education and Culture Office has not been fully implemented optimally as regulated in statutory regulations, especially in data collection on the number of regional assets owned and the systems and procedures for managing regional assets. This is due to the lack of Standard Operating Procedures (SOP), not having a warehouse where assets are stored, not having conducted an assessment and evaluation of asset managers and a lack of experts in regional asset management. For this reason, the Meranti Islands Regency Education and Culture Office should have a Standard Operating Procedure (SOP) for regional asset management, and have a special warehouse for storing regional assets. Assess and evaluate the performance of the asset manager periodically/quarterly and give appreciation or appreciation to the performance of regional asset managers in spurring morale and increasing a sense of responsibility, involving asset managers in trainings and having a special Accounting Staff in charge of assets.

Keywords: *Analysis, Regional Asset Management, Local Government*

### INTRODUCTION

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan, dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Adanya reformasi sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralisasi ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan aset daerah ini diharapkan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik (*good governance*). Sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta

perimbangan uang yang adil, professional dan transparan antar pemerintah menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat.

Untuk mewujudkan *good governance* yang merupakan agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah, masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai dengan transparansi dalam pengelolaan barang daerah atau aset. Sementara itu, perbaikankinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah perlu memperhatikan prinsip penanganan yang didasarkan pada pendekatan kinerja (*performance budget*) dan penatausahaan barang milik daerah yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberika kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian subsistem yang terdapat dalam organisasi itu sendiri yang terdiri atas struktur dan pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang merupakan rangkaian kegiatan organisasi atas sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Pandangan diatas mengisyaratkan bahwa proses organisasi adalah serangkaian dari seluruh aktivitas organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, sedangkan proses organisasi berlangsung berdasarkan sistematika, prosedur dan data kerja yang telah dianalisis sehingga memungkinkan penciptaan efisien tujuan organisasi.

Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan seperti halnya dengan pengelolaan aset daerah, sehingga tanpa adanya tata kerja yang baik serta partisipasi dan kerja sama dari seluruh pegawai, maka target yang ditetapkan tidak akan tercapai dengan optimal. Pengelolaan Aset Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti belum seutuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hal ini terlihat jelas dalam proses pengelolannya masih banyak terdapat kekurangan, seperti terdapat pada proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti saat sekarang ini belum berjalan, baru rencana proses untuk tahun yang akan datang. Belum tersusun sesuai dengan ketersediaan barang milik daerah yang ada. Rencana pembuatan disusun sebelum rencana kerja dan anggaran, jadi frekuensinya diadakan setiap satu tahun anggaran sebelum menyusun rencana kerja dan anggaran tersebut.

Proses pengadaan aset daerah/barang milik daerah di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti pada saat sekarang ini belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan belum adanya perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada kantor tersebut, terkadang pengadaan barang milik daerah tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Seharusnya perencanaan pengadaan barang harus sesuai dengan pemanfaatannya. Karena tidak adanya kesesuaian ini mengakibatkan pengadaan barang milik daerah tidak sesuai dengan pemanfaatan atau penggunaan yang ada dilapangan.

Dapat kita lihat pula tentang pengamanan aset daerah/barang milik daerah dilaksanakan seperti pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Kemudian untuk pengamanan fisik barang belum dapat maksimal dilakukan karena belum tersedianya gudang atau tempat penyimpanan. Pemeliharaan aset daerah/barang milik daerah di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan disebabkan tidak adanya rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, sehingga daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah tidak tersedia.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti”. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Kata “Pengelolaan” merupakan arti kata dari manajemen, secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Menurut Sondang P. Siagian, arti pengelolaan adalah soft skill/ keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga/ bantuan orang lain. Sedangkan Harold Koontz memberikan pengertian bahwa pengelolaan adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain. George R. Terry mengemukakan bahwa pengertian pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumberdaya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Fungsi pertama manajemen adalah *Planning* (perencanaan), sehingga perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan proses manajemen. Luther Gullick memberikan inisial untuk kegiatan manajemen dengan singkatan POSCORB, yang mempunyai arti sebagai berikut: a) *Planning* (perencanaan), yaitu bekerja secara luas menguraikan hal-hal yang perlu dilakukan dan metod untuk melakukannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan untuk perusahaan; b) *Organizing* (pengorganisasian), yaitu pembentukan struktur wewenang formal yang melaluinya subdivisi kerja diatur, ditetapkan, dan dikoordinasikan unuk tujuan yang telah ditentukan; c) *Staffing* (pelaksana, kepegawaian), yaitu sejumlah fungsi personil membawa dan melatih staf dan mempertahankan kondisi kerja yang menguntungkan.

Menurut Balderton dalam Rahardjo Adisasmita, istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>23</sup>

Drs. M. Manulang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas.

Berdasarkan pengertian manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahapan dalam melakukan manajemen meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat George R. Terry, yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Perencanaan yang baik menurut Adisasmita adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan, dengan maksud agar kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>26</sup> Selanjutnya Ranupandojo mendefinisikan perencanaan ialah pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya.<sup>27</sup> Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Dr. Sondang P. Siagian dalam Adam I. Indrawijaya mengemukakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

## METHODS

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Mengkaji objek yang mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara konsektual melalui pengumpulan data yang diperoleh, dengan melihat unsur-unsur sebagai satuan objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendeskripsikannya. Penulis bertindak sebagai pengamat, penulis melakukan pengamatan langsung dan mencatat dalam buku observasinya. Dengan suasana alamiah, peneliti terjun ke lapangan dan tidak berusaha memanipulasi variable sesuai dengan topic peneliti. Penulis ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori. Penulis bebas mengamati objek, menjelajahi dan menemukan wawasan- wawasan baru sepanjang jalan. Penulis terus menerus mengalami reformasi dan redireksi ketika informasi-informasi baru ditemukan. Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan penulis memilih tempat penelitian tersebut karena mudah dijangkau dan penulis sendiri bekerja di Instansi ini, sehingga mempermudah penulis dalam memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian serta permasalahan yang ada dan sesuai dengan judul penelitian.

Dalam penelitian kualitatif istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Menurut Sugiyono "sumber data dipilih dari orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu menemukan pintu kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data. Oleh karena itu dalam penelitian ini

penulis tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan informan yang dapat memberikan jawaban dan argument terhadap permasalahan yang penulis teliti.

## RESULT AND DISCUSSION

Analisis pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan aset daerah pada dinas tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Melalui pengelolaan yang baik, diharapkan aset daerah dapat tertata dan terdata sesuai dengan prosedurnya, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan aset daerah itu sendiri. Pada dasarnya pengelolaan aset atau sumber apapun yang dimiliki oleh daerah atau perusahaan mempunyai asas atau prinsip yang sama. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana proses pengelolaan aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya harus nyata dan di rasakan manfaatnya bagi kehidupan dan kemajuan rakyat. Oleh karena itu agar pengelolaan atau manajemen pengelolaan kekayaan daerah dapat mencapai hasil yang diharapkan, haruslah diterapkan prinsip-prinsip manajemen modern yang intinya adalah adanya perencanaan yang matang, pengorganisasian secara terstruktur, pelaksanaan yang tepat dan pengawasanyang ketat. Sesuai dengan George R. Terry, yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

### **Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.<sup>5</sup> Selain itu juga, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dijelaskan bahwa kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggungjawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia.

Standarisasi dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan, baik jenis, macam maupun jumlah dan besarnya barang yang dibutuhkan. Standarisasi merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kalitas, kapasitas, dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan Perencanaan Kebutuhan yang Matang, dapat dijelaskan sebagai berikut: Tahapan kegiatan Pengadaan aset daerah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa:

Pengadaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan biasanya kita melakukan pengusulan rencana kebutuhan barangmilik daerah dahulu sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan surat permintaan barang milik daerah dari DPKAD, kemudian setiap bidang membuat usulan dan bagian membuat usulan dan disampaikan kepada pengurus barang untuk direkap dan dikirim keDPKAD.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa:

Setiap perencanaan kebutuhan aset, DPKAD selalu menyurati OPD untuk menyampaikan kebutuhan barang sesuai dengan kebutuhan aset pada OPD bersangkutan termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentunya. Usulan ini juga dituangkan didalam RKA Dinas agar supaya nanti dalam pengesahan APBD dapat dituangkan dalam DPA Dinas.

Hasil wawancara penulis bersama kasubag keuangan dan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beliau menyampaikan bahwa :

Dalam melakukan pengadaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentu berdasarkan kebutuhan yang sudah kita disampaikan melalui daftar kebutuhan barang kepada DPKAD, yang dihimpun dari masing-masing bidang dan bagian yang ada. Jadi kita mengirimkan daftar usulan kepada DPKAD sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh OPD.

Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada penulis menyampaikan bahwa :

Untuk pengadaan aset tergantung usulan kita kepada DPKAD, berdasarkan daftar usulan kebutuhan aset di tiap-tiap OPD dan kita menyampaikan sesuai dengan kebutuhan dan usulan dari masing-masing bidang dan bagian yang ada di OPD.

Berdasarkan penjelasan informan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa mekanisme yang dilakukan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengadaan aset adalah sebagai berikut :

Pertama, SKPD mendapat surat permintaan kebutuhan barang dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan surat tersebut setiap SKPD diminta untuk menyampaikan daftar kebutuhan barang milik daerah untuk tahun tertentu.

Kedua, setiap bidang dan bagian di SKPD diminta mengajukan usulan kebutuhan barang milik daerah sesuai kebutuhan dalam Format Rencana Kebutuhan Barang yang ditujukan kepada kepala SKPD untuk diserahkan kepada pengurus barang untuk direkap dalam bentuk usulan SKPD serta memasukkannya kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Ketiga, pengurus barang merekap semua usulan dari masing-masing bidang dan bagian kedalam Form Rencana Kebutuhan Barang SKPD untuk selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh kepala SKPD sebagai usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dilakukan pengadaan barang atau aset bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menerapkan mekanisme pengadaan aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan bahwa :

Setiap tahun kita menganggarkan untuk pembelian aset ini sesuai yang kita butuhkan. Jadi kalau kita butuh sepeda motor maka kita usulkan diperencanaan awal itu sepeda motor karena kita memang betul butuh, begitu juga dengan aset lainnya. Cuma itu semuanya tergantung anggaran yang tersedia di daerah.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan bahwa :

Alhamdulillah memang kita menganggarkan disetiap tahun sesuai kebutuhan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setiap tahun sesuai dengan kondisi aset yang barangkali ada yang rusak, perlu diperbaharui dan perlu kita anggarkan sesuai kebutuhan. dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, ketersediaan barang, memperhatikan tingkat prioritas barang dan azas manfaat dari barang tersebut.

Kasubag Keuangan dan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan kepada peneliti bahwa :

Dinas kita sering menganggarkan pengadaan aset sesuai dengan kebutuhan, namun karena keterbatasan anggaran daerah kita sehingga perencanaan awal banyak yang tidak terpenuhi, tapi yang jelas kita setiap tahun mengusulkn dan menganggarkan untuk itu.

Bersama pengurus barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, beliau menyampaikan kepada penulis bahwasanya :

Yang kita usulkan itu berdasarkan usulan Dinas kita dan itu juga dibatasi standar kebutuhan aset tiap OPD, misalnya untuk OPD tipe A kebutuhan komputernya sekian begitu. Jadi kita mengusulkan sesuai dengan standar yang dibuat oleh DPKAD.

Dari beberapa penjelasan informan tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengadaan aset daerah telah menerapkan standar kebutuhan barang milik daerah, seperti memperhatikan kondisi keuangan daerah, dimana kebutuhan barang tersebut anggarannya tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD. Selanjutnya ketersediaan barang dengan memperhatikan bahwa barang yang dibutuhkan mudah didapat dan sesuai kebutuhan, baik jenis barang, kondisi barang, kapasitas barang maupun jumlah barang yang dibutuhkan.

Prioritas dan azas manfaat barang juga menjadi pertimbangan dalam standar kebutuhan pengadaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Tingkat prioritas kebutuhan barang menjadi perhatian penting dalam pengadaan aset daerah, guna untuk mentukan mana yang lebih diutamakan dari sekian banyak barang yang dibutuhkan seerta mengedepankan azas manfaat dari pengadaan barang tersebut.

Perencanaan kebutuhan barang hendaklah tepat sasaran sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, ketersediaan barang, memperhatikan tingkat prioritas barang dan azas manfaat dari barang tersebut. Pengadaan aset daerah tidak terlepas dari unsur-unsur yang terkait, seperti bidang-bidang dan bagian yang ada di SKPD serta instansi lainnya yang berhubungan dengan pengadaan aset daerah.

Dari hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, tentang perencanaan tepat sasaran dan mengikut sertakan unsur terkait, beliau mengatakan bahwa:

Jelas, dalam merencanakan aset atau barang milik daerah itu kita harus tepat sasaran, dalam artian jelas pemanfaatannya, sesuai keuangan dan sesuai pula peruntukannya, bukan asal-asal usul saja. Selain itu usulan ini bersumber dari usulan bidang-bidang dan bagian yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa :

Pengelolaan aset daerah pada dinas tersebut tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah, ketersediaan barang, memperhatikan tingkat prioritas barang dan azas manfaat dari barang tersebut. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang dan bagian dalam SKPD serta instansi lain yang terkait dalam perencanaan aset daerah.

Kasubag Keuangan dan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan bahwa :

Perencanaan terhadap pengusulan aset daerah untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti sudah tepat sasaran untuk memang memperhatikan tujuan dari perencanaan itu sendiri, yaitu tetap memperhatikan azas manfaat dan yang terpenting adalah ketersediaan anggaran dan barangnya.

Berdasarkan informasi dari Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, menjelaskan bahwa :

Bahwa pengelolaan aset daerah pada dinas seperti yang saya sampaikan tadi tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah, ketersediaan barang, memperhatikan tingkat prioritas barang dan azas manfaat dari barang tersebut yang merupakan dasar bahwa perencanaan itu tepat sasaran. Disamping itu juga melakukan Kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang dan bagian dalam SKPD serta instansi lain yang terkait dalam perencanaan aset daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan aset daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti telah tepat sasaran, seperti telah memperhatikan kondisi keuangan daerah, selain itu pula memperhatikan apakah barang yang dibutuhkan tersedia, disamping itu juga menentukan tingkat prioritas kebutuhan barang serta azas manfaat dari barang tersebut. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang dan bagian dalam SKPD serta instansi lain yang terkait dalam perencanaan aset daerah.

Berdasarkan hasil observasi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam perencanaan aset daerah telah menerapkan mekanisme pengadaan aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu juga dalam perencanaan aset telah disusun atau direncanakan sesuai dengan kebutuhan dinas itu sendiri dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, memperhatikan apakah barang yang dibutuhkan tersedia, dan tak kalah pentingnya adalah tingkat prioritas kebutuhan barang serta azas manfaatnya. Agar aset tersebut nantinya tepat sasaran maka dalam perencanaan kebutuhan aset dinas mengikutkan seluruh bidang dan bagian yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Pengorganisasian (*organizing*)**

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan

dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

Selain itu juga, agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha menyusun suatu organisasi, perlu kita perhatikan atau pedomani beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi,

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan sub indikator pengorganisasian secara terstruktur, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada dasarnya organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan dari organisasi untuk dicapai. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja atau prestasi kerja organisasi dan menunjukkan sebagai kinerja atau performa organisasi.

Dalam sebuah organisasi terdapat sebuah manajemen. Manajemen dikatakan sangat penting karena tidak ada organisasi yang berhasil dengan baik tanpa menerapkan manajemen secara baik pula. Manajemen menetapkan tujuan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk kemajuan serta pertumbuhan organisasi.

Menurut responden yang penulis temui, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, mengatakan bahwa:

Untuk struktur organisasi pengelola aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini kita menggunakan struktur yang berpatokan kepada tugas pokok dan fungsi dinas. Jadi kalau kita lihat aset itu di bawah kasubag keuangan dan aset jadi berada disekretariat. Maka jelaslah bahwa ada kepala dinas, sekretaris, ada kasubag keuangan dan aset serta pengurus barang itu sendiri.

Pertanyaan yang sama juga dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana ia menyatakan bahwa :

Memang secara tertulis struktur itu tidak ada tapi secara pelaksanaan dan koordinasi menggambarkan tentang struktur itu, seperti adanya pak kadis, kemudian kasubag keuangan dan aset, ada pengurus barang dan pembantu. Jadi sebenarnya inilah strukturnya tapi belum dibuat dalam bentuk bagan.

Kasubag Keuangan dan aset juga memberikan tanggapan tentang hal ini, dimana beliau menyampaikan :

Sebetulnya secara struktur yang di dinas sendiri sebetulnya ada, selama ini dikelola oleh pengurus barang dan pembantunya. Jadi kasubag keuangan dan aset itu hanya memantau sejauh mana inventarisasi aset-aset di dinas itu berjalan dengan baik.

Lain halnya dengan Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, beliau menjelaskan bahwa:

Sebenarnya itu ada sebab ada jenjang-jenjangnya, ada pengelola barang, penatausahaan barang dan ada pengurus barang yang di SK kan oleh Bupati.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang merupakan informan pendukung memberikan tanggapan bahwa :

Sepengetahuan saya secara pekerjaan saya lihat terorganisir lah. Artinya berjenjang dari kadis, kasubag keuangan, pengurus barang dan seterusnya. Tapi kalau bagan struktur memang belum ada.

Kepala Bidang yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, menjelaskan bahwa :

Struktur organisasi pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum ada dalam bentuk bagan tapi secara mekanisme pekerjaan mereka sudah berjenjang dalam pengelolaan aset dinas, mulai dari kadis selaku pimpinan, kemudian sekretaris, ada kasubag keuangan jg dan lain- lain.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada BAB II dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 04 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang Milik daerah pada BAB III Pasal 5 peraturan daerah tersebut.

Tugas pokok merupakan sebuah tugas yang sifatnya paling utama dalam suatu posisi pada organisasi. Secara umum, tugas pokok memberikan gambaran detail tentang ruang lingkup kerja dalam jabatan suatu organisasi.

Sedangkan fungsi merupakan wujud pekerjaan dari bidang tertentu yang dikerjakan dalam rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas pokok dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling terhubung.

Demikian pula halnya pada pengelolaan aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, menjelaskan bahwa :

Untuk tupoksi dari pengelola aset ini kita mengikuti tupoksi yang telah ditetapkan berdasarkan Perda 04 Tahun 2014, sudah jelas regulasinya, jadi kita tidak perlu lagi membuat tupoksi yang lain. Disitu ada Kepala SKPD, ada sekretaris, kasubag keuangan dan aset dan lainnya.<sup>26</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana beliau menyatakan :

Tupoksi itu ada sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti kepala dinas tuganya mengajukan kebutuhan barang kepada Bupati melalui pengurus barang. Jadi sudah ada tugas masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kasubag Keuangan dan Aset juga memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi pengelola aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa :

Pengelola aset daerah di Dinas ini ada tupoksi mereka masing- masing sesuai dengan jabatannya.<sup>28</sup>

Menurut pengurus barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa :

Tupoksi itu ada dan tertuang dalam SK Bupati Kepulauan Meranti. Seperti kepala dinas tugasnya apa, pengurus barang tugasnya apa, pengelola barang tugasnya apa, jadi semua sudah ada dalam SK tersebut.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang merupakan informan pendukung memberikan tanggapan bahwa :

Sepengetahuan saya mereka punya tugas masing-masing dalam mengelola aset di dinas kita ini, tentu berdasarkan SK yang telah ditetapkan.

Kepala Bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, menjelaskan bahwa :

Tentu setiap kepengurusan suatu organisasi atau Lembaga mempunyai tupoksi, jadi begitu juga dengan pengelola barang yang ada di dinas ini masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan jabatannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa pengelola aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai pembagian tugas dan fungsi sesuai wewenang masing-masing yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terdapat pada BAB II dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 04 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang Milik daerah yang terdapat pada BAB III pasal 5 dan 6 peraturan daerah tersebut.

## CONCLUSION

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun hasil penelitian terhadap Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya berjalan secara optimal sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam pendataan jumlah aset daerah yang dimiliki serta sistem dan prosedur dalam pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal pelaksanaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) tentang pengelolaan aset daerah pada dinas tersebut. Selain itu, pengawasan juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat penyimpangan dalam pemanfaatan aset daerah yang tumpang tindih. Selain itu juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti belum melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pengelola aset sehingga tidak tercapainya tujuan dari perencanaan kebutuhan aset daerah tersebut.

Dari semua keterangan tersebut diatas dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi mulai dari kurangnya pemahaman tentang pengelolaan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kurangnya kesadaran aparat pemerintah, kurang transparannya pengelolaan aset tersebut, kurangnya kontrol dan kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

## REFERENCES

### Book

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu.
- Baratakusumah, Dedy Spriady & Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Gullick, Luther and L. Urwick, 2003. *Papers on the Science of Administration Vol. IV*, New York.

- Haboddin, Muhtar. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- I. Indrawijaya, Adam. 2013. *Perilaku Organisasi*, Cetakan X, Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Kencana Syafiie, Inu. 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta : Refika Aditama.
- Kencana Syafiie, Inu. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Kencana Syafiie, Inu. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Kelapa Gading Permai.
- Manulang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru : Marpoyan Tujuh. Murtoyo, Susilo. 1998. *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, Jakarta : BPFE.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ningrat, Bayu Surya. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta. Nugraha, G. Setya & R. Maulina f, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karima.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah, Cetakan I*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pekei, Beni. 2019. *Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Di Era Otonomi (Teori Konsep dan Analisis) Cet. II*, Jakarta : Thausia.
- R. Terry, George. 2014. *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara.
- Ranupandojo, Heidjrahman. 1996. *Teori dan konsep Manajemen*, UPP-AMPYKPN.
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Cetakan I*, Pekanbaru : Zanafa Publishing.
- Siyoto, Sandu dan M. ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian, Cetakan I*, Literasi Media Publishing.
- Siregar, Doli. 2016. *Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah*, Jakarta : Sima (Sinergi Manajemen Aset).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Swanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*, Jakarta : PPM Manajemen.
- Taliziduhu, Ndraha, 2005. *Kybernologi Beberapa Konsep Utama*, Tangerang, Banten: Sirao Credentia Center.
- Yusuf, Muhammad. 2013. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Jakarta : Salemba Empat.

## Journal

- Brilliant Yehezkiel Sondakh, Harijanto Sabijono dan Lidia Mawikere, *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)*, Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017
- Doni, D., Yogya, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 41). European Alliance for Innovation.

- Esduo Ramadhano Labasido dan Darwanis, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 2, (2019)
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tentang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 9(2), 167-184.
- Ispik, A., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. *Pekanbaru City*.
- Nanang Suparman dan Arumsekarsari Dasanova Sangadji, *Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Dppkad Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku*, Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 2 Tahun 2018
- Nia Karniawati, *Jurnal; Hakikat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat)*, CosmoGov, Vol.1 No.2, Oktober 2015.
- Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. *Editor*, 12, 219.
- Riauan, M. A. I. (2013). Penggunaan Teknologi Komunikasi dalam Penerapan Good Governance. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 2(2), 102-107.
- Riauan, M. A. I., & Aziz, A. (2019). Professional Gamer: The Meaning on 'Point Blank Online' Play. *Jurnal The Messenger*, 11(1), 18-26.
- Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk Pada Pemilu Kota Pekanbaru 2011. *Medium*, 4(2).
- Riauan, M. A. I. (2012). Studi Komparatif Aktivitas Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. *Chevron Pacific Indonesia. Medium*, 1(1).
- Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1), 49-62.
- Satria, A., Yogya, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 282). European Alliance for Innovation.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
- Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia: Success or Failure?. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
- Yogya, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
- Zainal, Z., & Nurdasanah Putri, F. (2021). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District.